

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kabupaten Sidoarjo menjadi penyangga utama pada Kota Surabaya, hal tersebut dikarenakan lokasi wilayahnya terletak di kawasan strategis yang disebut dengan Gerbangkertosusila (gabungan beberapa daerah dari Kota Surabaya, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Mojokerto). Sehingga ke enam wilayah tersebut termasuk dalam kawasan metropolitan pada Provinsi Jawa Timur, dikarenakan letak wilayah yang strategis tersebut Kabupaten Sidoarjo sangat berkepentingan dengan stabilitas perekonomian. Terlebih lagi di Kabupaten Sidoarjo tidak hanya memiliki keuntungan pada letak wilayah yang strategis saja, populasi penduduk yang ada di Kabupaten Sidoarjo juga cukup tinggi jika dapat dibandingkan dengan beberapa wilayah lainnya di Provinsi Jawa Timur. Pernyataan tersebut dapat dibuktikan pada tabel populasi penduduk berikut.

Tabel 1.1 Populasi Penduduk Tahun 2023

| No. | Kabupaten/kota       | Populasi Penduduk |
|-----|----------------------|-------------------|
| 1.  | Kota Surabaya        | 2.893.698 jiwa    |
| 2.  | Kabupaten Malang     | 2.703.175 jiwa    |
| 3.  | Kabupaten Jember     | 2.584.771 jiwa    |
| 4.  | Kabupaten Sidoarjo   | 2.114.588 jiwa    |
| 5.  | Kabupaten Banyuwangi | 1.744.814 jiwa    |

Sumber: Portal Website Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (diakses pada tanggal 15 Maret 2024)

Sesuai keterangan pada tabel tersebut, besarnya populasi penduduk yang ada pada wilayah tersebut menjadikan Kabupaten Sidoarjo dapat termasuk dalam lima wilayah dengan populasi penduduk tertinggi di Provinsi Jawa Timur. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa total dari lima wilayah yang tercantum, populasi penduduk paling tertinggi pada urutan pertama ditempati oleh Kota Surabaya dengan jumlah penduduk 2.893.698 jiwa, kedua Kabupaten Malang terdapat 2.703.175 jiwa, ketiga Kabupaten Jember yaitu 2.584.771 jiwa, keempat ialah Kabupaten Sidoarjo dengan 2.114.588 jiwa, dan kelima Kabupaten Banyuwangi terdapat 1.744.814 jiwa.

Populasi penduduk yang cukup tinggi tersebut dapat menjadi suatu hal yang dapat berdampak positif karena dengan adanya populasi penduduk yang tinggi tersebut dapat memberikan peluang yang baik pada berbagai subjek seperti meningkatnya pembangunan dan perekonomian juga dapat berkembang karena dengan semakin tingginya populasi penduduk dapat mengakibatkan adanya peningkatan permintaan pada berbagai barang kebutuhan hidup sehingga pada akhirnya mendorong adanya peningkatan pada produksi menjadikan tenaga kerja sangat dibutuhkan dalam prosesnya (Falikhah, 2017).

Dengan adanya populasi yang tinggi, artinya memiliki banyak sumber daya manusia (SDM). Hal ini berguna sebagai kekuatan perekonomian yang besar bagi suatu wilayah. Dengan adanya tenaga kerja yang melimpah dari SDM yang ada, hingga dapat memenuhi kebutuhan dari tenaga kerja dalam berbagai sektor ekonomi. Hal tersebut dapat meningkatkan produktivitas, inovasi, serta daya saing wilayah tersebut dalam pasar global.

Adanya SDM yang terampil, terdidik, dan berpengalaman dapat mendorong pertumbuhan industri dan investasi di wilayah tersebut. Sumber daya manusia yang berlimpah juga dapat menciptakan kondisi yang menguntungkan dalam segi kreativitas dan inovasi. Dengan memiliki SDM yang memiliki latar belakang, serta pengetahuan, dan pengalaman yang berbeda pada wilayah tersebut dapat menjadi tempat pertukaran ide yang kaya serta beragam. Hal ini dapat mendorong terciptanya inovasi baru, pengembangan teknologi, dan pemecahan masalah yang lebih efektif (Sunarto, 2020).

Namun besarnya jumlah sumber daya manusia juga dapat menyebabkan meningkatnya tingkat pengangguran terbuka, menyebabkan lebih banyak orang yang mencari pekerjaan atau mereka yang belum menemukan pekerjaan menjadi pengangguran (Falikhah, 2017). Permasalahan pengangguran merupakan permasalahan yang pelik, karena pengangguran dapat mengakibatkan seseorang menjadi tidak produktif dan juga tidak mendapatkan penghasilan sehingga akan berdampak dengan timbulnya permasalahan kemiskinan yang dapat mempengaruhi aspek kehidupan lain, seperti masalah kesehatan, pendidikan, serta masalah lainnya (Prasetyo & Khodijah, 2020). Maka dari itu jika pengangguran tidak ditangani dengan cepat, dapat berakhir dengan munculnya permasalahan pada sektor perekonomian yang mengganggu stabilitas perekonomian.

Persoalan pengangguran hingga saat ini tidaklah hanya terjadi terhadap tingkat nasional saja, namun persoalan tersebut juga terjadi terhadap tingkat daerah kabupaten atau kota, termasuk juga Kabupaten Sidoarjo yang memiliki populasi penduduk yang cukup besar. Namun permasalahan pengangguran di Kabupaten Sidoarjo saat ini menjadi perhatian karena tingginya Tingkat

Pengangguran Terbuka yang terjadi. Hal tersebut dapat diperhatikan pada informasi kondisi ketenagakerjaan di kabupaten sidoarjo saat ini.

Tabel 1.2 Jumlah TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)  
di Provinsi Jawa Timur

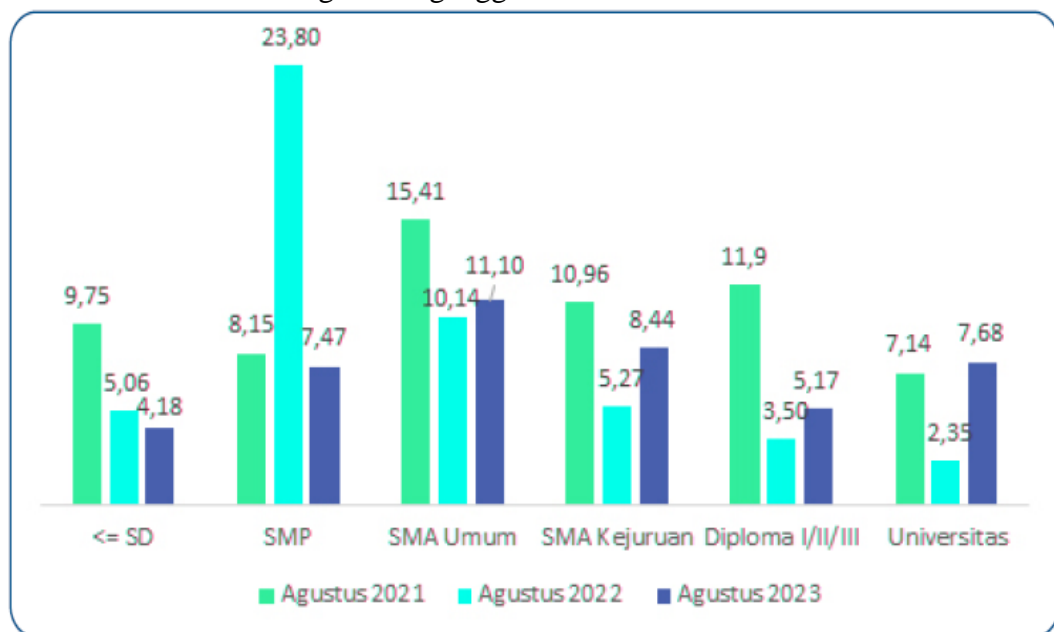
| No. | Kabupaten/Kota      | 2019 (%) | 2020 (%) | 2021 (%) | 2022 (%) | 2023 (%) |
|-----|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1.  | Kabupaten Sidoarjo  | 4,62     | 10,97    | 10,87    | 8,80     | 8,05     |
| 2.  | Kota Surabaya       | 5,76     | 9,79     | 9,68     | 7,62     | 6,76     |
| 3.  | Kabupaten Bangkalan | 5,62     | 8,77     | 8,07     | 8,05     | 6,18     |
| 4.  | Kota Madiun         | 3,96     | 8,32     | 8,15     | 6,39     | 5,85     |
| 5.  | Kabupaten Gresik    | 5,40     | 8,21     | 8,00     | 7,84     | 6,82     |

Sumber: Portal Website BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Jawa Timur  
(diakses pada tanggal 15 maret 2024)

Tabel tersebut menunjukkan lima wilayah dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi dapat diketahui Kabupaten Sidoarjo berada pada urutan pertama dalam tiga tahun terakhir dari keseluruhan wilayah di Jawa Timur. Kemudian pada tahun 2020 terjadi kenaikan TPT secara drastis pada keseluruhan wilayah, hal tersebut dikarenakan dampak dari terjadinya pandemi Covid-19 sehingga sebagian besar perusahaan atau lapangan pekerjaan memberlakukan pengurangan pekerja atau bisa disebut dengan PHK (pemutusan hubungan kerja) dan ada pula yang gulung tikar karena tidak mampu menanggung seluruh kerugian yang diterima pada saat itu. Namun pada tahun 2022 terjadi penurunan drastis TPT pada keseluruhan wilayah termasuk juga Kabupaten Sidoarjo, hal ini dikarenakan adanya PSBB (pembatasan sosial berskala besar) yang diberlakukan

pada masa pandemi sudah mulai longgar karena menurunnya kasus Covid-19 secara konsisten sehingga masyarakat mulai hidup dengan normal. Setelah kasus korban terjangkit Covid-19 sudah semakin mengecil pada tahun 2023, TPT juga mengalami penurunan namun tidak menurun secara drastis seperti yang terjadi sebelumnya pada tahun 2022.

Gambar 1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan



Sumber: Portal Website Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo (diakses pada tanggal 14 maret 2024)

Berdasarkan data tahun 2023, lulusan SMA merupakan kelompok terbesar, diikuti oleh lulusan sekolah teknik. Jumlah pengangguran meningkat pada lulusan SMA, SMK, diploma, dan universitas dibandingkan tahun 2022, tetapi pada kelompok lainnya justru menurun. Secara komparatif, penduduk yang berpendidikan diploma memiliki persentase terendah.

Pengangguran tidak hanya dapat menjadi beban serta penghambat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dijadikan sebagai parameter dari pasar tenaga kerja. Kondisi pengangguran yang rendah sering dilihat sebagai prestasi di daerah

dan begitu pula dengan keadaan sebaliknya dapat menjadi perhatian. Pengangguran berarti seseorang masuk usia kerja tetapi tidak bekerja. Menurut Swaramarinda, seseorang dianggap menganggur apabila sedang tidak bekerja sama sekali ataupun masih mencari pekerjaan dan ingin bekerja tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan, sedangkan tingkat dari pengangguran adalah rasio dari jumlah keseluruhan yang menganggur dengan jumlah keseluruhan angkatan kerja yang dinyatakan dalam bentuk presentase. Pengangguran biasanya muncul karena lowongan yang ada tidak dapat menyerap seluruh angkatan kerja.

Bagi sebagian besar wilayah, kemiskinan dan pengangguran masih menjadi masalah utama. Kedua masalah ini merupakan satu dan sama, hingga keduanya dapat menciptakan dua masalah yang saling bertolak belakang. Dualitas ini muncul ketika pemerintahan tidak mampu memanfaatkan dan juga meminimalkan efek yang ditimbulkan oleh kedua masalah tersebut secara memadai. Meskipun demikian, masalah tidak akan terjadi dan bahkan akan membantu mempercepat pembangunan jika pemerintah berhasil menggunakan tenaga kerja yang tersedia. Demikian pula, jika negara tidak dapat menggunakannya, hal itu dapat menimbulkan dampak buruk seperti menghambat perluasan ekonomi (Soleh, 2017).

Di sisi positifnya, salah satu aset terpenting untuk mendorong perluasan dan kemajuan ekonomi adalah tenaga kerja. Tetapi perluasan tenaga kerja kerap kali menjadi masalah ekonomi. Karenanya, penting untuk menggunakan tenaga kerja seefisien mungkin dalam situasi ini, jika pemerintah berupaya ingin bertahan dalam pembangunan wilayah, sebaliknya meningkatnya angkatan kerja yang tidak

terserap secara perlahan tapi pasti akan menjadi suatu hambatan dalam segi ekonomi hingga pada akhirnya dapat menjadi masalah (Soleh, 2017).

Gambar 1.2 Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja 2021-2023

| Status Keadaan Ketenagakerjaan            | Agustus 2021 | Agustus 2022 | Agustus 2023 | Perubahan Ags 2022–Ags 2023 |        |
|---|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------|
|   | ribu orang   | ribu orang   | ribu orang   | ribu orang                  | persen |
| (1)                                       | (2)          | (3)          | (4)          | (5)                         | (6)    |
| Penduduk Usia Kerja                       | 1.813,19     | 1.841,82     | 1.689,75     | -152,08                     | -8,26  |
| Angkatan Kerja                            | 1.205,17     | 1.342,07     | 1.176,48     | -165,59                     | -12,34 |
| - Bekerja                                 | 1.074,19     | 1.224,02     | 1.081,72     | -142,30                     | -11,63 |
| - Pengangguran                            | 130,98       | 118,06       | 94,76        | -23,30                      | -19,74 |
| Bukan Angkatan Kerja                      | 608,02       | 499,75       | 513,27       | 13,52                       | 2,70   |
|   | persen       | persen       | persen       | persen poin                 |        |
| Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)        | 10,87        | 8,8          | 8,05         | -0,75                       |        |
| - Laki-laki                               | 11,37        | 11,21        | 7,17         | -4,04                       |        |
| - Perempuan                               | 10,06        | 4,89         | 9,36         | 4,47                        |        |
| Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | 66,47        | 72,87        | 69,62        | -3,25                       |        |
| - Laki-laki                               | 82,06        | 89,96        | 83,18        | -6,78                       |        |
| - Perempuan                               | 50,86        | 55,76        | 56,07        | 0,31                        |        |

Sumber: Portal Website Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo (diakses pada tanggal 9 maret 2024)

Berdasarkan data di atas menurut Badan Pusat Statistik menunjukkan jumlah angkatan kerja pada tahun 2021 sebanyak 1.205,17 orang. Pada tahun 2022 angkatan kerja meningkat menjadi 1.342,07 orang. Sedangkan pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 1.176,48 orang. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa angkatan kerja mengalami kenaikan pada tahun 2022 kemudian terjadi penurunan pada tahun 2023. Dari hal tersebut, Kabupaten Sidoarjo memiliki cukup banyak sumber daya manusia yang seharusnya hal ini bisa mengarah pada hal positif dengan menjadi penunjang perekonomian wilayah tersebut.

Berdasarkan kondisi umum ketenagakerjaan di kabupaten sidoarjo pada tahun 2023 yang dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa isu yang perlu mendapat perhatian di antaranya: TPT Kabupaten Sidoarjo masih menduduki urutan tertinggi di Jawa Timur, meningkatnya TPT perempuan, dan TPT lulusan SMA dan SMK. TPT Kabupaten sidoarjo tinggi karena merupakan kota penyangga ibu kota Provinsi yang menjadi salah satu tujuan pendatang untuk mencari pekerjaan, baik di Kabupaten Sidoarjo maupun Kota Surabaya. Hal ini didukung dengan tingginya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo sebesar 7,53% pada tahun 2022 yang menyebabkan daya tawar pekerja di Sidoarjo lebih tinggi sehingga persaingan untuk mendapatkan perkerjaan menjadi lebih ketat.

Isu pengangguran ini harus segera dilakukan upaya lebih lanjut agar tidak merambat pada masalah lain yang bersangkutan. Penyebab terjadinya pengangguran umumnya bisa dikarenakan adanya kondisi khusus serta angkatan kerja tidak memiliki kompetensi yang cukup sehingga tidak dapat terserap oleh lapangan pekerjaan yang tersedia. Pengangguran tidak hanya bisa diatasi oleh penyediaan lapangan kerja saja namun angkatan kerja juga dapat membuka lapangan kerja sendiri sehingga dapat menyerap angkatan kerja yang membutuhkan. Maka dari itu kompetensi dari seorang angkatan kerja sangatlah penting, sehingga dapat meningkatkan kualitas dirinya dan juga dapat menurunkan tingkat pengangguran terbuka.

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelatihan Kerja Dan Pelayanan Produktivitas, bahwa hal yang menjadi pertimbangan dalam rangka peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja pada era liberalisasi, pembangunan ketenagakerjaan di Kabupaten



Sidoarjo melalui peningkatan kemampuan dan kompetensi tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, menjadi sangat penting dan mendesak untuk dilaksanakan. Dengan itu, pemerintah wajib menyelenggarakan Pelatihan Kerja sesuai dengan otonomi daerah di bidang ketenagakerjaan, tercantum Pada Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.

Mengatasi masalah pengangguran ialah salah satu dari tugas dan kewenangan pemerintah, Pemerintah Sidoarjo telah melimpahkan kewenangannya dalam mengatasi permasalahan ketenagakerjaan tersebut kepada Dinas Tenaga Kerja termaktub dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 92 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo Pasal 4 yakni menegaskan bahwa menjadi pembantu dalam urusan pemerintahan yang berkaitan dengan transmigrasi dan ketenagakerjaan, serta tugas pendukung lainnya yang dilimpahkan kepada Kabupaten, merupakan tanggung jawab Dinas Tenaga kerja Kabupaten Sidoarjo.

Upaya untuk menurunkan angka pengangguran, pemerintah berupaya mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Maka adanya Peraturan Menteri (PERMEN) Ketenagakerjaan No. 39 Tahun 2016 Tentang Penempatan Tenaga Kerja yang menjelaskan secara konvensional bahwa merupakan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja kepada masyarakat agar masyarakat memperoleh pekerjaan dan pemberi kerja dalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan minat, bakat, kemampuan dan menjelaskan informasi tentang lowongan pekerjaan, pelatihan, penyuluhan, bimbingan jabatan dan perantara kerja.

Dinas Tenaga Kerja sebagai instansi pemerintahan yang memiliki tanggung jawab pada bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Sidoarjo dalam mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Kabupaten Sidoarjo, mengadakan suatu program yang diharapkan dapat mengurangi jumlah pengangguran yang ada agar angkatan kerja yang menganggur dapat bekerja dengan layak sesuai dengan kemampuan serta keterampilannya. Maka dari itu, upaya yang dilakukan oleh Dinas Tenaga kerja Kabupaten Sidoarjo dalam mengurangi jumlah pengangguran yang tinggi yaitu dengan mengadakan pelatihan berbasis kompetensi.

“ANTARAJATIM - "Kegiatan ini merupakan bentuk perhatian Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk membantu mengurangi pengangguran di daerah setempat," ungkap Ainun Amalia, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo. "Kami berupaya untuk mengurangi pengangguran di Sidoarjo melalui pelatihan seperti ini. Agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan pekerjaan dapat mandiri di sektor informal dan tidak bergantung pada pekerjaan formal, kami berupaya untuk memberikan mereka keterampilan," ungkapnya. Sumber: <https://jatim.antaranews.com/berita/724143/tekan-pengangguran-disnaker-sidoarjo-berikan-pelatihan-menjahit> (diakses 19 maret 2024).”

Pasal 1 ayat (24) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Kerja dan Pelayanan Produktivitas menyebutkan bahwa pelatihan berbasis kompetensi merupakan pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja. Pelatihan berbasis kompetensi lebih condong pada pembelajaran praktis daripada pembelajaran teoritis dapat diartikan sebagai kegiatan pelatihan yang dapat meningkatkan dan membangun produktivitas, keterampilan, sikap kerja, dan disiplin kerja. Dinas Tenaga kerja bertugas melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi, khususnya berkaitan produktivitas

tenaga kerja dan pelatihan kerja. Selaras dengan Pasal 18 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sidoarjo yang menyebutkan bahwa Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja bertugas melaksanakan pelatihan kerja.

Meskipun Balai Latihan Kerja (BLK) melakukan pelatihan kerja akan tetapi pada hakikatnya setara dengan pelatihan berbasis kompetensi ini, namun yang membedakan dengan BLK adalah pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi ini diadakan oleh Dinas Tenaga Kerja dengan sumber dana dari APBD dan pelatihan berbasis kompetensi ini tidak memiliki kepastian dari lokasi pelaksanaannya sehingga pelaksanaannya sendiri diadakan di desa atau kecamatan yang terdapat pengangguran atau angkatan kerja yang baru lulus setelah menempuh pendidikan. Sedangkan pelatihan kerja yang dilakukan oleh BLK sendiri berdasarkan dari kementerian ketenagakerjaan dengan sumber dana yang bersumber dari kementerian ketenagakerjaan dan memiliki lokasi tetap untuk melaksanakan pelatihan.

Pelatihan berbasis kompetensi ini telah dilaksanakan di berbagai kecamatan/desa di kabupaten sidoarjo dengan melaksanakan delapan jenis pelatihan berbasis kompetensi, diantaranya yaitu: pelatihan berbasis kompetensi menjahit, pastry, menjahit upper sepatu, perawatan AC, servis sepeda motor, junior desain grafis, pengoperasian mesin cnc, dan barista. Jumlah peserta pelatihan dari setiap jenis pelatihannya terdapat 16 peserta pelatihan, kecuali untuk jenis pelatihan pastry terdapat 20 peserta pelatihan.

Pengadaan pelatihan keterampilan bertujuan meningkatkan skill ataupun keahlian dari pencari kerja agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja atau perusahaan, serta dapat membantu menyerap pengangguran dan juga pencari kerja bisa memiliki peluang dalam membuka usaha mandiri sesuai dengan skill yang dimilikinya. Meski demikian, berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo terkait pelatihan berbasis kompetensi tahun 2023, masih banyak lulusan yang belum bekerja meski telah menyelesaikan pelatihan. Hal ini mencakup peserta yang tidak lulus uji kompetensi maupun yang lulus. Hal tersebut dapat diperhatikan pada tabel berikut ini.

Tabel 1.3 Data Pelatihan Berbasis Kompetensi Selama 4 Triwulan Pada Tahun 2023

| No.                  | Jenis Pelatihan         | Jumlah Peserta | Jumlah Peserta Lulus Uji Kompetensi |
|----------------------|-------------------------|----------------|-------------------------------------|
| 1.                   | Menjahit                | 128            | 123                                 |
| 2.                   | Pastry                  | 200            | 200                                 |
| 3.                   | Barista                 | 48             | 48                                  |
| 4.                   | Menjahit Upper Sepatu   | 48             | 48                                  |
| 5.                   | Perawatan AC            | 48             | 48                                  |
| 6.                   | Servis Sepeda motor     | 64             | 14                                  |
| 7.                   | Junior Desain Grafis    | 48             | 23                                  |
| 8.                   | Pengoperasian Mesin CNC | 32             | 32                                  |
| <b>Jumlah</b>        |                         | <b>608</b>     | <b>536</b>                          |
| <b>Sudah Bekerja</b> |                         | <b>384</b>     |                                     |
| <b>Belum Bekerja</b> |                         | <b>152</b>     |                                     |

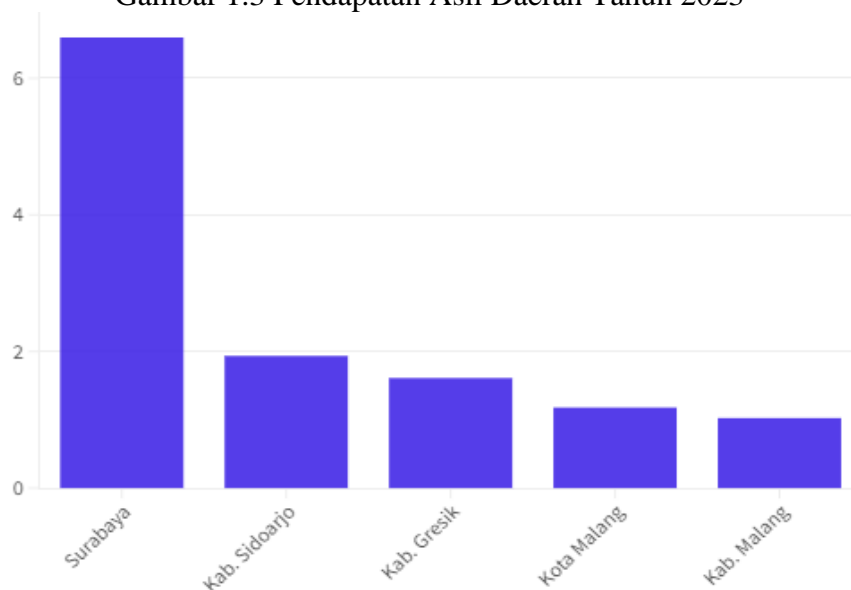
Sumber: Dokumen Dinas Tenaga Kerja “Kegiatan Pelatihan Bidang LATTAS Tahun 2023”

Kabupaten Sidoarjo termasuk dalam salah satu daerah dengan kinerja penurunan pengangguran terbaik di Jawa Timur namun disamping itu Kabupaten

Sidoarjo masih dalam kondisi yang sama dengan sebelumnya yakni daerah dengan persentase tingkat pengangguran tertinggi dari keseluruhan wilayah di Provinsi Jawa Timur. Banyak pekerja yang tidak memiliki keterampilan yang sesuai karena saat ini banyak pekerjaan yang memerlukan keterampilan tinggi, sehingga sulit, hal ini menciptakan kesenjangan dan membutuhkan penanganan dengan melakukan pelatihan kerja (Irianto et al., 2023).

Kenyataannya kabupaten sidoarjo ini termasuk dalam lima daerah dengan Pendapatan Asli Daerah tertinggi di Jawa Timur pada tahun 2023 hal tersebut dibuktikan dengan informasi berikut.

Gambar 1.3 Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023



Sumber: Data Kemenkeu RI 2023 (diakses pada tanggal 26 februari 2024)

Pertama, Surabaya memiliki rasio PAD tertinggi di antara daerah lainnya yaitu sebesar 62%. PAD Surabaya pada tahun 2023 mencapai 6.595,91 miliar rupiah yang menjadi kontribusi penting bagi APBD 2023 kota tersebut. Kedua, Kabupaten Sidoarjo memiliki rasio PAD sebesar 41%, dengan jumlah PAD sebesar 1.935,04 miliar rupiah. Baik nominal atau rasio PAD Sidoarjo masih

lebih rendah dibandingkan dengan Surabaya. Jumlah PAD yang cukup signifikan untuk Kabupaten Sidoarjo seyogyanya dapat mempermudah pemerintah merealisasikan pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik berbasis digital. Ketiga, Kabupaten Gresik memiliki rasio PAD yang hampir sama dengan Sidoarjo yaitu sebesar 42%. Namun, jumlah PAD Gresik pada tahun 2023 sebesar 1.610,93 miliar rupiah, yang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan PAD Sidoarjo.

Keempat, Kota Malang memiliki rasio PAD sebesar 46%, dengan jumlah PAD sebesar 1.179,18 miliar rupiah. meski PAD Kota Malang relatif kecil dibanding tiga daerah diatas, namun rasionya lebih tinggi dari pada Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sidoarjo yang masing-masing 42% dan 41%. hal ini menunjukkan APBD Kota Malang lebih sehat dari dua daerah tersebut. Kelima, Kabupaten Malang dengan rasio 23% pada tahun 2023 mencapai 1.025,59 miliar rupiah. Kabupaten Malang merupakan daerah dengan rasio PAD terendah dibanding empat daerah lainnya.

Pendapatan asli daerah merupakan tanda kemandirian daerah melalui peningkatan sumber pendapatan daerah. Pendapatan daerah yang tinggi menunjukkan bahwa daerah tersebut menjadi lebih mandiri dalam membuat keputusan dan kebijakan untuk pembangunan daerah. Santosa menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah memiliki hubungan negatif yang besar dengan pengangguran karena pendapatan asli daerah yang lebih tinggi mengindikasikan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dan menjadi lebih produktif sehingga terserap lebih banyak tenaga kerja (Yeimo & Ayuningsasi, 2022). Namun pada kenyataannya Kabupaten Sidoarjo sendiri masih berada pada urutan pertama

dengan tingkat pengangguran terbuka tertinggi di Jawa Timur meskipun tingkat pengangguran terbukanya mengalami penurunan.

Maka dari itu, keberlanjutan dari pelatihan berbasis kompetensi yang diarahkan untuk menekan Tingkat Pengangguran Terbuka diharap kedepannya dapat lebih maksimal upayanya sehingga program pelatihan berbasis kompetensi bisa memberi dampak baik bagi peserta karena dengan mengadakan program ini secara berkelanjutan dapat menghasilkan angkatan kerja yang kompeten dan mendapat pekerjaan sesuai kompetensinya ataupun dapat menciptakan lapangan kerja mandiri dengan membuka usaha baru sehingga dapat memberikan banyak peluang bagi para pengangguran.

Berdasarkan penjelasan latar belakang ini, penulis memiliki ketertarikan dalam melakukan penelitian terkait Program Pelatihan Berbasis Kompetensi. Dengan judul penelitian **“Efektivitas Program Pelatihan Berbasis Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Di Kabupaten Sidoarjo”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian ini ialah bagaimana Efektivitas Program Pelatihan Berbasis Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Di Kabupaten Sidoarjo?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengukur Efektivitas Program Pelatihan Berbasis Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Di Kabupaten Sidoarjo.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai dan juga dampak positif secara teoritis serta secara praktis yang relevan dengan bidang Administrasi Publik. Kontribusi dari penelitian yang ingin diberikan secara rinci yakni sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penulis berharap dapat memberikan manfaat dengan digunakan sebagai bahan pertimbangan serta dapat memperoleh pandangan dimasa mendatang secara menyeluruh dan juga penelitian ini dapat bermanfaat sebagai perbandingan penelitian yang relevan dengan bidang administrasi publik. Selain itu, dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan, referensi, ataupun informasi tambahan bagi pembaca terutama untuk akademis yang sedang mendalami bidang administrasi publik.

b. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian diharap dapat dijadikan bahan pertimbangan dan pengetahuan terutama terkait Efektivitas Program Pelatihan Berbasis Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Di Kabupaten Sidoarjo yang dapat dimanfaatkan sebagai masukan serta kajian terkait pelatihan berbasis kompetensi yang sudah dilaksanakan. Sehingga dari hasil penelitian ini bisa menjadi pembelajaran serta perbaikan pada pelaksanaan program pelatihan berbasis kompetensi di masa mendatang.